

**ANALISIS PENETAPAN NILAI RESTITUSI OLEH LPSK DAN
HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)**

Diajukan kepada Fakultas Hukum sebagai Salah Satu

Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

pada Program Studi Magister Hukum



Oleh:

Yunita Kurniasari

NIM. 2320113002

Pembimbing:

- 1. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

**Analisis Penetapan Nilai Restitusi Oleh LPSK Dan Hakim Terhadap Korban
Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Teori Keadilan
(Studi Di Pengadilan Negeri Painan)**

**Yunita Kurniasari, 2320113002, Program Magister Hukum, Universitas
Andalas, 112 halaman, 2025**

ABSTRAK

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil dan imateriil yang diderita akibat tindak pidana. Kerugian materiil meliputi kerugian yang berkaitan dengan harta benda dan biaya pengobatan dan atau rehabilitasi, sementara kerugian imateriil mencakup penderitaan fisik dan mental yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana restitusi dapat memenuhi rasa keadilan korban dan mengobati perlakuan tidak adil serta tidak senonoh yang korban rasakan. Selain itu peneliti juga menganalisis bagaimana penetapan nilai restitusi yang dilakukan oleh LPSK dapat berpengaruh putusan hakim dalam studi kasus tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Painan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, data primer yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yang bersumber dari Hakim dan Petuga LPSK yang berkaitan langsung dengan kasus korban tindak pidana pornografi yang jadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian restitusi yang ditetapkan oleh LPSK dan Hakim, dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang yang mana hakim menilai untuk adanya kemungkinan pelaku lain sehingga restitusi akan menjadi tidak adil apabila dilimpahkan pada kelima pelaku saja, sementara LPSK hanya berfokus pada adanya lima tersangka yang dilaporkan. Namun, dalam membuat putusan, Hakim tetap menjadikan surat keputusan dari LPSK sebagai pertimbangan untuk menetapkan nilai restitusi yang dapat diperoleh korban. Dalam penelitian ini, Penulis merekomendasikan Hakim sebaiknya memprioritaskan prinsip keadilan bagi korban dan tidak menjadikan keberadaan pelaku lain yang belum diadili sebagai alasan utama untuk mengurangi tanggung jawab terdakwa yang telah terbukti bersalah. Untuk mengatasi beban tanggung jawab yang tidak proporsional, pengadilan dapat menggunakan mekanisme tanggung renteng atau pembagian tanggung jawab, tanpa mengurangi hak korban atas pemulihan penuh.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Pornografi, LPSK, Teori Keadilan.

***Analysis of Restitution Determination by LPSK and Judges for Victims of
Pornography Crimes from the Perspective of Justice Theory
(A Study at the Painan District Court)***

***(Yunita Kurniasari, 2320113002, Master of Laws Program Andalas University, 112
pages, 2025)***

ABSTRACT

Restitution is compensation provided to victims or their families by the perpetrator or a third party. This compensation includes both material and immaterial losses suffered as a result of a criminal act. Material losses refer to damages related to property and the costs of medical treatment and/or rehabilitation, while immaterial losses encompass the physical and psychological suffering experienced by the victim as a direct result of the crime committed by the perpetrator. This study explains how restitution can fulfill the victim's sense of justice and address the unfair and improper treatment experienced. Furthermore, the researcher analyzes how the restitution value determined by the LPSK can influence the judge's decision in a case study on a pornography-related criminal offense at the Painan District Court. The research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data used in the study were obtained through interviews with judges and LPSK officers directly involved in the case of the pornography crime victim being studied. The findings show a discrepancy between the restitution valuation set by LPSK and that of the judge. This difference arises from varying perspectives: the judge considered the possibility of other perpetrators being involved, which would make the restitution unfair if imposed solely on the five defendants. In contrast, LPSK focused only on the five reported suspects. However, in making the ruling, the judge still considered the LPSK's decision letter as a reference for determining the restitution amount to be granted to the victim. The author recommends that judges prioritize the principle of justice for the victim and avoid using the existence of other, untried perpetrators as the main reason to reduce the responsibility of the defendants who have been proven guilty. To address the issue of disproportionate responsibility, the court may implement mechanisms such as joint liability or proportional distribution of responsibility, without diminishing the victim's right to full recovery.

Keywords: Restitution, Pornographic Crime, LPSK, Theory of Justice